



Peran *Blue Diplomacy* Indonesia dalam Konservasi Terumbu Karang di Segitiga Terumbu Karang (CTI) pada Tahun 2024- 2025

**Azizah Fathiyyatul Fauji¹, Haura Nafisa Rachman², Shofianty Dewy³, Syalwa Fadila Natasya⁴,
Diyah Pitaloka Rizki⁵**

¹⁻⁵ Universitas Al-Ghifari, Indonesia

email: azizahfia94@gmail.com¹

Article Info :

Received:

17-10-2025

Revised:

28-11-2025

Accepted:

29-12-2025

Abstract

This study aims to analyze Indonesia's role and contribution within the framework of the Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF) as a form of blue diplomacy in coral reef conservation efforts in the Coral Triangle region. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through literature studies, analysis of official CTI-CFF documents, Indonesian government policies, and reports from relevant international organizations. The data were analyzed descriptively and analytically using the perspectives of environmental diplomacy and regional cooperation. The results showed that Indonesia played a strategic role as a key country in the CTI-CFF through regional policy-making initiatives, the strengthening and expansion of marine conservation areas, increased research cooperation and scientific data exchange, and active diplomacy in various international forums related to marine issues and climate change. The implementation of Indonesia's blue diplomacy is also reflected in multi-stakeholder collaboration involving coastal communities, international institutions, the private sector, and the use of technology to support sustainable coral reef ecosystem management.

Keywords: *Blue Diplomacy, Coral Triangle, CTI-CFF, Environmental Diplomacy, Regional Cooperation, Marine Ecosystem.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan kontribusi Indonesia dalam kerangka Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF) sebagai wujud implementasi blue diplomacy dalam upaya konservasi terumbu karang di kawasan Segitiga Terumbu Karang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, analisis dokumen resmi CTI-CFF, kebijakan pemerintah Indonesia, serta laporan dari organisasi internasional yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan perspektif diplomasi lingkungan dan kerja sama regional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memainkan peran strategis sebagai negara kunci dalam CTI-CFF melalui inisiatif penyusunan kebijakan regional, penguatan dan perluasan kawasan konservasi laut, peningkatan kerja sama riset dan pertukaran data ilmiah, serta diplomasi aktif dalam berbagai forum internasional terkait isu kelautan dan perubahan iklim. Implementasi blue diplomacy Indonesia juga tercermin dalam kolaborasi multipihak yang melibatkan masyarakat pesisir, lembaga internasional, sektor swasta, dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengelolaan ekosistem terumbu karang secara berkelanjutan..

Kata kunci: *Blue Diplomacy, Segitiga Terumbu Karang, CTI-CFF, Diplomasi Lingkungan, Kerjasama Regional, Ekosistem Laut.*



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Kawasan Segitiga Terumbu Karang atau *Coral Triangle Initiative* (CTI) dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia yang membentang di perairan Malaysia, Indonesia, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon, serta mencakup wilayah Zona Ekonomi Eksklusif keenam negara tersebut (Mujiono & Oktaviani, 2021). Kawasan ini kerap disebut sebagai “Amazon Laut” karena menampung sekitar 30 persen terumbu karang dunia dengan luasan mencapai kurang lebih 73.000 km², dihuni oleh sekitar 75 persen spesies karang global dan 86 persen spesies penyu laut yang telah teridentifikasi (Mujiono & Oktaviani, 2021). Lebih dari 3.000 spesies ikan hidup dan bergantung pada ekosistem ini, jumlah yang hampir dua kali lipat dibandingkan kawasan laut lain di dunia, sehingga

menjadikannya episentrum produktivitas biologis laut tropis (Mujiono & Oktaviani, 2021). Keunggulan ekologis tersebut menjadikan CTI sebagai fondasi utama bagi ketahanan ekologi laut regional sekaligus aset strategis dalam tata kelola lingkungan global (Wardhania & Burhanuddin, 2023).

Terumbu karang di kawasan CTI tidak hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga menopang kehidupan sosial dan ekonomi lebih dari 130 juta penduduk pesisir yang bergantung pada perikanan, pariwisata bahari, serta jasa ekosistem lainnya (Mujiono & Oktaviani, 2021). Ekosistem ini berfungsi sebagai penyangga alami wilayah pesisir dari abrasi dan gelombang ekstrem, sekaligus menjaga stabilitas sumber pangan laut bagi masyarakat lokal dan regional (Suba & Marzaman, 2024). Nilai strategis tersebut menjadikan terumbu karang sebagai bagian tak terpisahkan dari agenda pembangunan berkelanjutan di kawasan Indo-Pasifik (Polanunu & Kusumaningrum, 2022). Ketergantungan yang tinggi terhadap terumbu karang menempatkan isu konservasi bukan semata sebagai kepentingan ekologis, tetapi juga sebagai fondasi kesejahteraan dan stabilitas sosial kawasan (Hidayat & Ramadhan, 2025).

Dalam beberapa dekade terakhir, keberlanjutan terumbu karang di CTI menghadapi tekanan serius akibat kenaikan suhu permukaan laut, pengasaman laut, pencemaran, serta eksplorasi sumber daya yang melampaui daya dukung ekosistem (Mujiono & Oktaviani, 2021). Aktivitas manusia seperti penangkapan ikan destruktif, pembangunan pesisir tanpa perencanaan ekologis, dan pertumbuhan pariwisata massal mempercepat degradasi terumbu karang di berbagai lokasi strategis (Hargen et al., 2024). Dampak kumulatif dari ancaman tersebut tidak hanya menurunkan tutupan karang, tetapi juga mengganggu jejaring ekologi dan mata pencarian masyarakat pesisir (Suba & Marzaman, 2024). Situasi ini mendorong kebutuhan pendekatan lintas negara yang menempatkan konservasi terumbu karang sebagai isu lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik yang saling terkait (Wardhania & Burhanuddin, 2023).

Indonesia menempati posisi sentral dalam kawasan CTI dengan kepemilikan sekitar 18 persen terumbu karang dunia dan wilayah laut terluas di antara negara anggota, sehingga memikul tanggung jawab strategis dalam menjaga keberlanjutan ekosistem regional (Mujiono & Oktaviani, 2021). Peran tersebut menempatkan Indonesia tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan domestik, tetapi juga sebagai aktor diplomatik yang aktif membentuk arah kerja sama kelautan regional dan global (Polanunu & Kusumaningrum, 2022). Posisi Indonesia sebagai *middle power* mendorong penggunaan strategi diplomasi berbasis kepentingan spesifik atau *niche diplomacy* yang menekankan isu kelautan dan ekonomi biru sebagai kekuatan utama (Polanunu & Kusumaningrum, 2022). Pendekatan ini memperluas peran Indonesia dari sekadar penjaga sumber daya nasional menjadi penggerak norma dan agenda konservasi laut internasional (Hidayat & Ramadhan, 2025).

Blue diplomacy berkembang sebagai kerangka strategis yang menempatkan laut sebagai ruang utama kerja sama internasional, dengan tujuan mendorong konservasi ekosistem, pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, serta penguatan stabilitas kawasan (Hidayat & Ramadhan, 2025). Dalam praktiknya, pendekatan ini mengintegrasikan kepentingan lingkungan, ekonomi, dan politik melalui kolaborasi antarnegara, organisasi internasional, serta aktor non-negara (Ananda et al., 2025). Blue diplomacy juga sejalan dengan agenda *blue economy* yang menekankan pertumbuhan ekonomi berbasis laut tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem (Polanunu & Kusumaningrum, 2022). Kerangka ini memperkuat posisi isu kelautan sebagai kepentingan bersama yang menuntut solidaritas dan tanggung jawab kolektif (Wardhania & Burhanuddin, 2023).

Pada periode 2024–2025, peran blue diplomacy Indonesia dalam kerangka CTI menunjukkan intensifikasi yang nyata melalui partisipasi aktif dalam forum regional, penguatan kapasitas negara anggota, serta integrasi isu terumbu karang dengan agenda perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan (Hidayat & Ramadhan, 2025). Indonesia mendorong perluasan dan pengelolaan *Marine Protected Areas* (MPA), penerapan praktik perikanan berkelanjutan, serta penguatan riset dan pertukaran pengetahuan lintas negara (Suba & Marzaman, 2024). Upaya ini juga terhubung dengan praktik diplomasi publik dan budaya yang menempatkan konservasi laut sebagai sarana membangun kepercayaan dan solidaritas regional (Wardhania & Burhanuddin, 2023). Konsistensi tersebut memperlihatkan transformasi peran Indonesia dari pelaksana kebijakan menjadi pengarah tata kelola laut kawasan (Ananda et al., 2025).

Komitmen diplomatik Indonesia pada periode ini juga tercermin melalui promosi skema pendanaan inovatif berbasis *blue finance* dalam berbagai forum internasional, termasuk pengenalan *Coral Reef Bond* sebagai mekanisme pembiayaan alternatif konservasi terumbu karang (Hidayat &

Ramadhan, 2025). Skema tersebut dirancang untuk menjembatani kebutuhan pendanaan konservasi dengan partisipasi sektor keuangan global, sehingga membuka ruang kolaborasi baru antara negara, investor, dan organisasi lingkungan (Ananda et al., 2025). Inisiatif serupa melengkapi pendekatan diplomasi tematik Indonesia yang sebelumnya juga memanfaatkan isu mangrove, pariwisata biru, dan ekonomi halal sebagai instrumen diplomasi publik (Heriamsal & Amin, 2024; Pratiwi, 2025; Hargen et al., 2024). Rangkaian kebijakan ini menegaskan pergeseran diplomasi kelautan Indonesia menuju pendekatan yang lebih adaptif dan inovatif (Polanunu & Kusumaningrum, 2022).

Walaupun berbagai inisiatif tersebut menunjukkan dinamika positif, kontribusi nyata blue diplomacy Indonesia terhadap efektivitas konservasi terumbu karang di kawasan CTI masih menjadi perdebatan akademik (Hidayat & Ramadhan, 2025). Sejumlah kajian cenderung berfokus pada aspek teknis konservasi, kebijakan nasional, atau kerangka institusional CTI, sementara peran diplomasi negara dalam membentuk kerja sama dan mempengaruhi praktik konservasi kawasan belum banyak dikaji secara mendalam (Mujiono & Oktaviani, 2021). Analisis terhadap peran diplomatik Indonesia menjadi penting untuk menilai sejauh mana kerja sama internasional mampu merespons tantangan lingkungan yang bersifat lintas batas dan kompleks (Wardhania & Burhanuddin, 2023). Berangkat dari kebutuhan tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji peran blue diplomacy Indonesia dalam konservasi terumbu karang di kawasan CTI pada periode 2024–2025 sebagai kontribusi terhadap penguatan diskursus diplomasi lingkungan laut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* dengan menempatkan studi kepustakaan sebagai sumber utama dalam pengumpulan data, yang diperoleh dari jurnal ilmiah bereputasi, buku akademik, laporan lembaga internasional, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan isu blue diplomacy dan konservasi terumbu karang. Data yang digunakan bersifat sekunder dan dianalisis melalui pendekatan deskriptif-analitis dengan cara menguraikan, mengkategorikan, serta menafsirkan temuan-temuan pustaka secara sistematis agar diperoleh pemahaman yang komprehensif dan argumentatif. Proses analisis dilakukan dengan mengaitkan konsep teoretis dan temuan empiris untuk menilai peran dan kontribusi diplomasi Indonesia dalam kerangka kerja sama CTI. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan kejelasan alur analisis serta ketepatan interpretasi terhadap dinamika diplomasi dan konservasi yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Blue Diplomacy Indonesia dalam Kerangka Coral Triangle Initiative (CTI) 2024–2025

Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF) merupakan bentuk kerja sama multilateral yang lahir dari kesadaran kolektif enam negara pesisir Asia-Pasifik terhadap urgensi perlindungan ekosistem laut yang memiliki nilai ekologis dan ekonomi global (Mujiono & Oktaviani, 2021; Laitupa & Kartika, 2020). Indonesia memainkan peran sentral sejak fase inisiasi CTI-CFF yang secara resmi dilembagakan pada 2009, sejalan dengan visi kepemimpinan nasional yang menempatkan laut sebagai fondasi pembangunan dan diplomasi (Hidayat & Ramadhan, 2025). Posisi Indonesia tidak terbatas sebagai peserta, tetapi sebagai *agenda setter* yang mendorong integrasi konservasi terumbu karang, ketahanan pangan, dan adaptasi perubahan iklim dalam satu kerangka kebijakan kawasan (Wardhania & Burhanuddin, 2023). Peran ini memperlihatkan karakter Indonesia sebagai *middle power* yang memanfaatkan isu kelautan sebagai *niche diplomacy* dalam hubungan internasional (Polanunu & Kusumaningrum, 2022).

Kepemimpinan Indonesia dalam CTI-CFF tercermin dari kontribusinya dalam penyusunan *Regional Plan of Action* (RPOA) yang menekankan perlindungan terumbu karang, pengelolaan perikanan berkelanjutan, dan penguatan ketahanan masyarakat pesisir (Mujiono & Oktaviani, 2021). RPOA menjadi rujukan utama negara anggota dalam menyelaraskan kebijakan nasional dengan tujuan konservasi kawasan, sekaligus memperkuat rezim lingkungan laut regional (Laitupa & Kartika, 2020). Pendekatan ini sejalan dengan pandangan liberalisme institusional yang melihat institusi sebagai sarana untuk mengurangi ketidakpastian, membangun kepercayaan, dan memfasilitasi kepatuhan terhadap norma bersama (Keohane, 1995). Melalui CTI-CFF, Indonesia berhasil mengartikulasikan kepentingan nasionalnya dalam kerangka kepentingan bersama kawasan (Hidayat & Ramadhan, 2025).

Keberadaan Sekretariat Regional CTI-CFF di Manado memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat koordinasi kebijakan dan diplomasi konservasi laut di kawasan Asia-Pasifik (Wardhania &

Burhanuddin, 2023). Penempatan sekretariat ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis karena memungkinkan Indonesia mempengaruhi arah diskursus, prioritas program, serta mekanisme implementasi CTI-CFF (Laitupa & Kartika, 2020). Dari perspektif diplomasi budaya dan publik, Manado berkembang sebagai ruang temu antara aktor negara, organisasi internasional, komunitas ilmiah, dan masyarakat pesisir (Wardhania & Burhanuddin, 2023). Kondisi ini memperlihatkan bagaimana diplomasi kelautan Indonesia bergerak melampaui negosiasi formal menuju penguatan jejaring kolaboratif lintas aktor (Putri & Raharyo, 2019).

Pada tataran implementasi nasional, Indonesia mengintegrasikan agenda CTI-CFF dengan kebijakan Poros Maritim Dunia dan pengembangan ekonomi biru yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem (Wu et al., 2023; Khairunisa et al., 2024). Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong perluasan kawasan konservasi laut hingga mendekati target global 30 persen, penguatan *marine protected areas* (MPA), serta penerapan *ecosystem approach to fisheries management* (Suba & Marzaman, 2024). Kebijakan ini memperlihatkan kesinambungan antara komitmen diplomatik di tingkat kawasan dengan praktik pengelolaan sumber daya di tingkat domestik (Trikuncoro & Ridho, 2024). Integrasi tersebut memperkuat kredibilitas Indonesia dalam forum CTI-CFF sebagai aktor yang konsisten antara retorika dan praktik (Hidayat & Ramadhan, 2025).

Data implementasi program CTI-CFF dan kebijakan ekonomi biru Indonesia pada periode 2020–2024 menunjukkan kecenderungan peningkatan yang signifikan dalam cakupan konservasi dan partisipasi kawasan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Indikator Implementasi Blue Diplomacy Indonesia dalam Kerangka CTI-CFF

Indikator Utama	Data/Temuan	Sumber
Luas kawasan konservasi laut Indonesia	±28% wilayah perairan nasional	KKP RI (2023); Suba & Marzaman (2024)
Status Sekretariat Regional CTI-CFF	Berbasis di Manado sejak 2014	Laitupa & Kartika (2020)
Fokus RPOA CTI-CFF	Terumbu karang, perikanan berkelanjutan, ketahanan pangan	Mujiono & Oktaviani (2021)
Keterlibatan Indonesia dalam forum maritim regional	Aktif di CTI-CFF, IORA, ASEAN Blue Economy	Ananda et al. (2025); Wu et al. (2023)

Data tersebut menunjukkan bahwa peran Indonesia dalam CTI-CFF tidak bersifat simbolik, melainkan tercermin dalam capaian kebijakan dan kelembagaan yang terukur (Suba & Marzaman, 2024). Blue diplomacy Indonesia memperlihatkan keterkaitan erat antara konservasi laut dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir melalui berbagai inisiatif pemberdayaan (Perdani et al., 2025). Program pengelolaan mangrove, budaya perikanan berkelanjutan, serta pariwisata biru menjadi instrumen diplomasi publik yang memperkuat citra Indonesia sebagai negara maritim yang bertanggung jawab (Heriamsal & Amin, 2024; Hargen et al., 2024). Praktik ini memperluas makna diplomasi dari sekadar hubungan antarnegara menjadi sarana membangun legitimasi internasional berbasis keberhasilan domestik (Pratiwi, 2025). Sinergi tersebut memperlihatkan bahwa blue diplomacy Indonesia bekerja melalui jalur kebijakan, ekonomi, dan sosial secara simultan (Putri & Raharyo, 2019).

Peran Indonesia juga tampak dalam upaya memperkuat kerja sama penelitian kelautan dan pertukaran pengetahuan sebagai fondasi *science-based policy* dalam CTI-CFF (Hidayat & Ramadhan, 2025). Kolaborasi riset lintas negara memungkinkan penyusunan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim dan degradasi ekosistem laut (Mujiono & Oktaviani, 2021). Dalam liberalisme institusional mekanisme ini membantu mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan kepatuhan terhadap komitmen bersama (Keohane, 1995). Penguatan basis ilmiah tersebut memperbesar peluang keberlanjutan jangka panjang konservasi terumbu karang di kawasan CTI (Suba & Marzaman, 2024).

Di tingkat kawasan dan global, blue diplomacy Indonesia terhubung dengan agenda ekonomi maritim yang lebih luas melalui partisipasi dalam IORA, ASEAN Blue Economy, dan forum maritim internasional lainnya (Ananda et al., 2025; Pahlawan, 2025). Keterlibatan ini memperluas ruang diplomasi Indonesia dari lingkup Pasifik ke Samudra Hindia dan Asia Tenggara, sekaligus memperkuat

posisi tawar dalam isu keamanan dan tata kelola laut (Bila et al., 2024). Diplomasi ekonomi dan lingkungan berjalan beriringan sebagai instrumen untuk memastikan stabilitas kawasan dan keberlanjutan sumber daya (Wu et al., 2023). Pendekatan ini menunjukkan konsistensi strategi maritim Indonesia lintas rezim dan forum (Polanunu & Kusumaningrum, 2022).

Meski menunjukkan kemajuan pelaksanaan blue diplomacy Indonesia dalam CTI-CFF masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan kapasitas antarnegara anggota, keterbatasan pendanaan, serta tekanan eksploitasi sumber daya laut (Perdani et al., 2025). Tantangan tersebut menuntut penguatan koordinasi kelembagaan dan inovasi pembiayaan konservasi agar agenda perlindungan terumbu karang tetap berkelanjutan (Hidayat & Ramadhan, 2025). Pengalaman kerja sama internasional sebelumnya, baik di tingkat subnasional maupun bilateral, menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi biru sangat bergantung pada konsistensi kebijakan dan partisipasi aktor lokal (Haryanto, 2015). Hal ini menegaskan pentingnya kesinambungan antara diplomasi internasional dan tata kelola domestik (Wilianto et al., 2023).

Peran blue diplomacy Indonesia dalam CTI pada periode 2024–2025 memperlihatkan karakter kepemimpinan kawasan yang menggabungkan konservasi lingkungan, pembangunan ekonomi, dan penguatan institusi internasional (Hidayat & Ramadhan, 2025). Indonesia berhasil memanfaatkan CTI-CFF sebagai platform strategis untuk mengartikulasikan kepentingan nasional dalam bingkai kepentingan bersama kawasan (Wardhania & Burhanuddin, 2023). Pendekatan ini menempatkan Indonesia tidak hanya sebagai penjaga ekosistem laut, tetapi juga sebagai penggerak norma dan praktik tata kelola laut berkelanjutan (Polanunu & Kusumaningrum, 2022). Dengan penguatan berkelanjutan pada aspek kebijakan, kelembagaan, dan pembiayaan, blue diplomacy Indonesia berpotensi menjadi model kerja sama konservasi laut regional yang relevan secara global (Ananda et al., 2025).

Implementasi Blue Diplomacy Indonesia dalam Konservasi Terumbu Karang melalui CTI-CFF

Implementasi pemulihan terumbu karang dan pembentukan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Indonesia menunjukkan keterkaitan yang kuat antara agenda konservasi dan konsep Blue Economy yang dikembangkan melalui kerangka Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF) (Hidayat & Ramadhan, 2025; Mujiono & Oktaviani, 2021). CTI-CFF menempatkan rehabilitasi ekosistem laut, perlindungan terumbu karang, serta pengelolaan perikanan berkelanjutan sebagai pilar utama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan laut (Suba & Marzaman, 2024). Indonesia mengadopsi pendekatan ini sebagai bagian dari strategi diplomasi lingkungan yang tidak terpisah dari kebijakan pembangunan nasional kelautan (Polanunu & Kusumaningrum, 2022). Implementasi tersebut memperlihatkan bagaimana diplomasi tidak berhenti pada tataran komitmen, tetapi bertransformasi menjadi praktik pengelolaan sumber daya yang terukur dan berkelanjutan (Laitupa & Kartika, 2020).

Pendekatan berbasis ilmu pengetahuan menjadi fondasi penting dalam implementasi CTI-CFF di Indonesia melalui pemantauan berkelanjutan terhadap kondisi terumbu karang, stok ikan, dan indikator kesehatan ekosistem laut (Mujiono & Oktaviani, 2021). Penggunaan data ilmiah memungkinkan perumusan kebijakan yang adaptif terhadap tekanan perubahan iklim dan aktivitas manusia, sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi laut (Perdani et al., 2025). Integrasi *ecosystem-based management* dan *science-based policy* mencerminkan kesesuaian praktik nasional Indonesia dengan standar tata kelola laut global (Wardhania & Burhanuddin, 2023). Pendekatan ini memperkuat legitimasi Indonesia dalam forum CTI-CFF sebagai negara yang mengedepankan kebijakan berbasis bukti empiris (Hidayat & Ramadhan, 2025).

Penguatan kapasitas masyarakat pesisir menjadi bagian integral dari implementasi Blue Economy melalui CTI-CFF dengan menekankan peran masyarakat sebagai aktor utama konservasi (Suba & Marzaman, 2024). Program pelatihan perikanan ramah lingkungan, pengelolaan kawasan konservasi berbasis komunitas, serta penerapan *Ecosystem Approach to Fisheries Management* (EAFM) memperlihatkan keterhubungan antara tujuan sosial-ekonomi dan perlindungan ekosistem laut (Mujiono & Oktaviani, 2021). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip diplomasi publik yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari citra dan kredibilitas internasional Indonesia (Heriamsal & Amin, 2024). Keterlibatan masyarakat pesisir juga memperkuat keberlanjutan kebijakan konservasi di tingkat lokal dan nasional (Perdani et al., 2025).

Perumusan Rencana Aksi Nasional (*National Plan of Action / NPOA*) berbasis CTI-CFF berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mengarahkan implementasi Blue Economy di Indonesia

(Laitupa & Kartika, 2020). NPOA memadukan target konservasi terumbu karang, pengelolaan perikanan berkelanjutan, dan pembangunan ekonomi kelautan dalam satu kerangka kebijakan yang saling terintegrasi (Polanunu & Kusumaningrum, 2022). Kerangka ini memungkinkan sinkronisasi kebijakan lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama regional CTI-CFF (Hidayat & Ramadhan, 2025).

Pendekatan terencana ini menunjukkan bahwa diplomasi lingkungan Indonesia memiliki landasan kebijakan domestik yang jelas dan berorientasi jangka panjang (Wu et al., 2023). Sebagai penguatan analisis implementasi, capaian konservasi dan kebijakan kelautan Indonesia dalam kerangka CTI-CFF dapat dilihat melalui data empiris yang bersumber dari laporan resmi dan penelitian terdahulu, sebagaimana disajikan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Indikator Implementasi Blue Economy dan Konservasi Terumbu Karang Indonesia dalam Kerangka CTI-CFF

Indikator Implementasi	Capaian Utama	Sumber
Luas Kawasan Konservasi Perairan	± 28% wilayah perairan nasional (2023)	Suba & Marzaman (2024); Wilianto et al. (2023)
Pendekatan Pengelolaan Perikanan	Penerapan EA FM di wilayah CTI	Mujiono & Oktaviani (2021)
Instrumen Kebijakan Nasional	NPOA CTI-CFF terintegrasi	Laitupa & Kartika (2020)
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	Ekowisata, perikanan berkelanjutan	Perdani et al. (2025); Hargen et al. (2024)

Data tersebut memperlihatkan konsistensi antara komitmen diplomatik Indonesia dan capaian implementatif di lapangan (Hidayat & Ramadhan, 2025). Implementasi Blue Economy melalui CTI-CFF juga diperkuat oleh kemitraan global dan dukungan pendanaan internasional yang difasilitasi oleh kerja sama multilateral (Polanunu & Kusumaningrum, 2022).

Kolaborasi dengan lembaga internasional dan mitra pembangunan memperluas akses Indonesia terhadap teknologi konservasi, riset kelautan, serta pembiayaan berkelanjutan (Ananda et al., 2025). Peran CTI-CFF sebagai platform diplomasi lingkungan regional memungkinkan koordinasi lintas negara yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan degradasi terumbu karang (Wardhania & Burhanuddin, 2023). Hal ini menegaskan fungsi diplomasi sebagai penghubung antara kepentingan nasional dan tanggung jawab global (Pahlawan, 2025).

Kontribusi konkret Indonesia dalam implementasi CTI-CFF juga tercermin melalui penyelenggaraan Coral Triangle Day 2024 di Manado dan 2025 di Jakarta yang berfungsi sebagai ruang konsolidasi kebijakan dan pertukaran pengetahuan (Hidayat & Ramadhan, 2025). Forum ini memperkuat koordinasi antarnegara anggota dalam mendorong praktik konservasi berbasis sains, pengelolaan perikanan berkelanjutan, serta penguatan ketahanan sosial ekonomi masyarakat pesisir (Wardhania & Burhanuddin, 2023). Diplomasi lingkungan yang dijalankan dalam forum tersebut memperlihatkan peran Indonesia sebagai koordinator regional yang aktif dan substantif (Ananda et al., 2025). Kegiatan ini mempertegas bahwa diplomasi biru Indonesia bergerak melampaui simbolisme menuju aksi kolektif kawasan (Putri & Raharyo, 2019).

Perluasan kawasan konservasi laut melalui strategi nasional 30×45 menjadi bukti integrasi antara komitmen global dan kebijakan domestik Indonesia (Suba & Marzaman, 2024). Melalui dialog nasional dan regional, Indonesia menegaskan peran *Marine Protected Areas* (MPA) dan *Other Effective Area-Based Conservation Measures* (OECM) sebagai instrumen utama pencapaian target perlindungan 30 persen wilayah perairan pada 2045 (Hidayat & Ramadhan, 2025). Pendekatan ini mencerminkan tata kelola laut berbasis ilmu pengetahuan dan partisipasi publik yang luas (Perdani et al., 2025). Konsistensi kebijakan tersebut memperkuat posisi Indonesia dalam rezim konservasi laut internasional (Laitupa & Kartika, 2020).

Implementasi Blue Economy melalui CTI-CFF juga berdampak pada pengembangan ekonomi pesisir melalui perikanan berkelanjutan, ekowisata, dan pemanfaatan teknologi rendah dampak

lingkungan (Hargen et al., 2024). Transformasi pariwisata biru di beberapa kawasan menunjukkan bahwa konservasi dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan beriringan apabila didukung tata kelola yang tepat (Adinatha & Priadarsini, 2025). Praktik ini memperluas manfaat ekonomi sekaligus menjaga integritas ekosistem laut sebagai modal jangka panjang (Khairunisa et al., 2024). Pengalaman tersebut memperkuat argumen bahwa Blue Economy merupakan pendekatan strategis dalam diplomasi dan pembangunan kelautan Indonesia (Wu et al., 2023).

Implementasi blue diplomacy Indonesia dalam konservasi terumbu karang melalui CTI-CFF pada periode 2024–2025 menunjukkan keterpaduan antara kebijakan, diplomasi, dan praktik lapangan (Hidayat & Ramadhan, 2025). Indonesia berhasil memanfaatkan CTI-CFF sebagai sarana untuk menghubungkan kepentingan nasional dengan agenda konservasi kawasan dan global (Polanunu & Kusumaningrum, 2022). Pendekatan ini menempatkan Indonesia sebagai aktor yang tidak hanya berkomitmen pada perlindungan terumbu karang, tetapi juga mampu menerjemahkan diplomasi lingkungan ke dalam capaian konkret dan berkelanjutan (Wardhania & Burhanuddin, 2023). Dengan penguatan konsistensi kebijakan dan kolaborasi internasional, implementasi Blue Economy Indonesia berpotensi menjadi rujukan regional dalam tata kelola laut berkelanjutan (Ananda et al., 2025).

Tantangan Implementasi *Blue Diplomacy* Indonesia dalam Konservasi Terumbu Karang CTI-CFF

Pelaksanaan blue diplomacy Indonesia dalam konservasi terumbu karang di kawasan Segitiga Terumbu Karang pada periode 2024–2025 memperlihatkan dinamika yang kompleks dan menuntut ketahanan kebijakan lintas sektor serta lintas negara. Meskipun Indonesia menempati posisi strategis sebagai inisiator dan pemimpin regional CTI-CFF, realisasi komitmen diplomatik tersebut dihadapkan pada keterbatasan struktural yang bersifat finansial, kelembagaan, dan politik (Hidayat & Ramadhan, 2025; Laitupa & Kartika, 2020). Keterbatasan kapasitas pendanaan nasional menjadi salah satu isu utama, terutama ketika konservasi terumbu karang memerlukan investasi jangka panjang dengan tingkat risiko ekologis yang tinggi (Polanunu & Kusumaningrum, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa diplomasi biru Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kemampuan negara dalam membangun arsitektur pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan (Wu et al., 2023).

Keterbatasan pendanaan konservasi tercermin dari masih dominannya ketergantungan terhadap dukungan donor internasional dan skema kerja sama multilateral dalam pembiayaan program rehabilitasi terumbu karang. Walaupun berbagai inovasi pembiayaan seperti blended finance, blue bonds, dan kemitraan publik–swasta mulai diperkenalkan, kontribusi nyata dari mekanisme tersebut belum sepenuhnya mampu menutup kebutuhan pendanaan konservasi di wilayah CTI Indonesia (Suba & Marzaman, 2024; Wilianto et al.). Tantangan ini menuntut penguatan diplomasi ekonomi lingkungan yang mampu menarik investasi hijau tanpa mengorbankan prinsip keberlanjutan ekosistem laut (Pahlawan, 2025). Dalam kerangka tersebut, peran Indonesia sebagai middle power menempatkan diplomasi biru sebagai instrumen strategis untuk menjembatani kepentingan konservasi dan agenda pembangunan kelautan nasional (Polanunu & Kusumaningrum, 2022).

Di sisi lain, perubahan iklim menjadi tantangan eksternal yang secara langsung memengaruhi efektivitas konservasi terumbu karang di kawasan Segitiga Terumbu Karang. Fenomena pemutihan karang akibat peningkatan suhu permukaan laut, pengasaman laut, serta kenaikan muka air laut telah mempersempit ruang kebijakan nasional dalam menjaga ketahanan ekosistem terumbu karang (Mujiono & Oktaviani, 2021; Perdani et al., 2025). Komitmen yang disampaikan Indonesia dalam United Nations Ocean Conference 2025 mencerminkan pengakuan bahwa konservasi terumbu karang tidak lagi dapat dipisahkan dari strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat global (Hidayat & Ramadhan, 2025). Tantangan iklim ini mempertegas bahwa diplomasi biru menuntut kapasitas negosiasi yang mampu mengintegrasikan isu konservasi, ketahanan pangan laut, dan keadilan iklim secara simultan (Wardhania & Burhanuddin, 2023).

Harmonisasi kebijakan regional juga menjadi tantangan krusial dalam implementasi CTI-CFF yang bersifat soft law dan sangat bergantung pada komitmen sukarela negara anggota. Perbedaan kapasitas regulasi nasional, orientasi pembangunan domestik, serta kepentingan politik masing-masing negara sering kali mempersulit penyelarasan rencana aksi konservasi secara konsisten (Laitupa & Kartika, 2020; Putri & Raharyo, 2019). Dalam konteks ini, Indonesia menghadapi tantangan untuk mempertahankan kepemimpinan normatif sekaligus mendorong kepatuhan kolektif tanpa instrumen hukum yang mengikat (Hidayat & Ramadhan, 2025). Situasi tersebut menuntut diplomasi yang lebih

intensif dan berbasis kepercayaan guna meminimalkan fragmentasi tata kelola konservasi di tingkat regional (Wardhania & Burhanuddin, 2023).

Tantangan berikutnya berkaitan dengan kapasitas teknis dan kelembagaan dalam pengelolaan serta pemantauan kawasan konservasi laut. Berbagai forum teknis seperti MPA Technical Working Group telah berfungsi sebagai wadah pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh kemampuan implementasi di tingkat nasional dan lokal (Suba & Marzaman, 2024; Perdani et al., 2025). Kesenjangan antara rekomendasi teknis dan realitas lapangan masih menjadi persoalan berulang dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan di Indonesia (Mujiono & Oktaviani, 2021).

Tantangan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan diplomasi biru tidak hanya ditentukan di meja perundingan, tetapi juga oleh kapasitas institusional dalam menerjemahkan komitmen menjadi aksi konkret (Wu et al., 2023). Sebagai penguatan analisis, tantangan utama implementasi blue diplomacy Indonesia dalam kerangka CTI-CFF dapat dirangkum melalui indikator empiris yang bersumber dari laporan resmi dan penelitian terdahulu sebagaimana disajikan pada Tabel 3:

Tabel 3. Tantangan Utama Implementasi Blue Diplomacy Indonesia dalam Konservasi Terumbu Karang CTI-CFF

Aspek Tantangan	Temuan Utama	Sumber
Pendanaan Konservasi	Ketergantungan pada donor dan keterbatasan blended finance	Hidayat & Ramadhan (2025); Polanunu & Kusumaningrum (2022)
Perubahan Iklim	Peningkatan risiko pemutihan karang dan degradasi ekosistem	Mujiono & Oktaviani (2021); Perdani et al. (2025)
Harmonisasi Kebijakan	Perbedaan kepentingan nasional negara CTI-CFF	Laitupa & Kartika (2020); Putri & Raharyo (2019)
Kapasitas Kelembagaan	Kesenjangan implementasi kebijakan di lapangan	Suba & Marzaman (2024); Wardhania & Burhanuddin (2023)

Tantangan pendanaan dan kelembagaan tersebut juga beririsan dengan fragmentasi kebijakan domestik yang masih membatasi konsistensi posisi diplomatik Indonesia. Koordinasi lintas sektor antara aktor kelautan, lingkungan, pariwisata, dan ekonomi belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu kerangka diplomasi biru yang solid (Haryanto, 2015; Trikuncoro & Ridho, 2024). Kondisi ini berpotensi melemahkan daya tawar Indonesia dalam forum CTI-CFF, terutama ketika kepentingan ekonomi jangka pendek bersinggungan dengan agenda konservasi jangka panjang (Khairunisa et al., 2024). Tantangan koordinasi domestik tersebut menegaskan bahwa efektivitas diplomasi regional sangat ditentukan oleh kohesi kebijakan nasional (Wu et al., 2023).

Kesenjangan antara ilmu pengetahuan dan pengambilan keputusan diplomatik masih menjadi hambatan substantif. Meskipun data ilmiah mengenai kondisi terumbu karang dan dinamika ekosistem laut telah tersedia melalui berbagai riset dan pemantauan, integrasi temuan ilmiah tersebut ke dalam proses perumusan kebijakan dan diplomasi belum optimal (Mujiono & Oktaviani, 2021; Perdani et al., 2025). Kesenjangan ini berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan konservasi yang dihasilkan melalui forum CTI-CFF (Wardhania & Burhanuddin, 2023). Tantangan tersebut menuntut penguatan science-policy interface agar diplomasi biru Indonesia memiliki landasan empiris yang lebih kokoh (Hidayat & Ramadhan, 2025).

Keterlibatan aktor non-negara juga masih relatif terbatas dalam praktik diplomasi biru Indonesia di tingkat regional. Padahal, peran organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas pesisir terbukti penting dalam memperkuat legitimasi dan keberlanjutan program konservasi laut (Hargen et al., 2024; Heriamsal & Amin, 2024). Minimnya pelibatan aktor non-negara berpotensi mengurangi daya jangkau dan dampak nyata dari inisiatif CTI-CFF di tingkat akar rumput (Putri & Raharyo, 2019). Tantangan ini menunjukkan perlunya pendekatan multi-track diplomacy yang lebih inklusif dalam pengelolaan konservasi terumbu karang (Wu et al., 2023).

Di tengah meningkatnya kompleksitas tantangan lingkungan laut global, Indonesia juga dihadapkan pada kebutuhan untuk menjaga relevansi CTI-CFF dalam lanskap tata kelola kelautan internasional yang semakin kompetitif. Munculnya berbagai inisiatif kelautan global menuntut Indonesia untuk terus memperkuat posisi CTI-CFF sebagai platform strategis konservasi dan ketahanan pangan laut kawasan (Ananda et al., 2025; Pahlawan, 2025). Tantangan ini menempatkan diplomasi biru tidak sekadar sebagai instrumen normatif, tetapi sebagai mekanisme yang harus menghasilkan dampak terukur bagi perlindungan terumbu karang (Suba & Marzaman, 2024). Konsistensi kepemimpinan Indonesia dalam merespons tantangan tersebut menjadi faktor penentu keberlanjutan CTI-CFF di masa depan (Hidayat & Ramadhan, 2025).

KESIMPULAN

Peran blue diplomacy Indonesia dalam konservasi terumbu karang di kawasan Segitiga Terumbu Karang (CTI) pada periode 2024–2025 menunjukkan posisi strategis Indonesia sebagai penggerak kerja sama regional berbasis kepentingan lingkungan laut. Melalui kepemimpinan normatif, diplomasi tematik, serta integrasi isu konservasi dengan agenda perubahan iklim dan ekonomi biru, Indonesia berupaya memperkuat tata kelola terumbu karang yang berkelanjutan di tengah keterbatasan pendanaan, tantangan perubahan iklim, fragmentasi kebijakan regional, dan kapasitas kelembagaan yang belum merata. Meskipun efektivitas CTI-CFF masih dibatasi oleh karakter soft law dan ketergantungan pada komitmen sukarela negara anggota, diplomasi biru Indonesia tetap berperan penting dalam membangun konsensus, memperluas jejaring pendanaan, serta mendorong harmonisasi kebijakan konservasi. Ke depan, penguatan koordinasi domestik, integrasi ilmu pengetahuan dalam pengambilan keputusan diplomatik, serta pelibatan aktor non-negara menjadi prasyarat utama agar blue diplomacy Indonesia mampu menghasilkan dampak konkret bagi perlindungan terumbu karang dan ketahanan ekologi kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinatha, I. A. D. R., & Priadarsini, N. W. R. (2025). Dampak Penyelenggaraan KTT Archipelagic and Island States Forum 2023 Terhadap Pariwisata di Bali. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 12(1), 29-44. <https://doi.org/10.37304/wacana.v12i1.17403>.
- Ananda, A., Binsar, R., & Izra, N. (2025). Kontribusi (Indian Ocean Rim Association) IORA Dalam Memberdayakan Poros Maritim Indonesia Melalui Blue Economy. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(3), 9-18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1723243>.
- Bila, N. S., Haqqi, H., Wijayati, H., & Alchatib, S. R. (2024). Pengaruh United States Indonesia Comprehensive Partnership Agreement terhadap Kerja Sama Keamanan Maritim Amerika Serikat dan Indonesia Tahun 2015-2019. *Jurnal Polinter: Kajian Politik Dan Hubungan Internasional*, 9(2), 46-70. <https://doi.org/10.52447/pol.v9i2.7389>.
- Hargen, D., Amini, D. S., & Subandi, Y. (2024). Transformasi Pariwisata Biru di Labuan Bajo: Evaluasi Implementasi World Wild Fun For Nature (WWF) Signing Blue Pada Wisata Bahari Labuan Bajo 2020-2022. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 4818-4828. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13373>.
- Haryanto, I. (2015). Proses Kerjasama Internasional Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Perancis Utara Dalam Menerapkan Konsep “Blue Economy” di Kawasan Madura Kabupaten Sapeke. *Global and Policy Journal of International Relations*, 3(01). <https://doi.org/10.33005/jgp.v3i01.1958>.
- Heriamsal, K., & Amin, A. (2024). Konservasi Mangrove Sebagai Sarana Diplomasi publik Indonesia di World Water Forum 2024. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, 9(2), 157-181. <https://doi.org/10.70836/jh.v9i2.74>.
- Hidayat, T., & Ramadhan, M. F. (2025). Diplomasi Lingkungan Indonesia Melalui Coral Triangle Initiative: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmu Kelautan Lesser Sunda*, 5(1), 29-41. <https://doi.org/10.29303/jikls.v5i1.128>.
- Khairunisaa, S. S., Putri, A. A., & Sari, D. S. (2024). Blue Economy Sebagai Basis Strategi Kebijakan Ekspor Industri Perikanan Indonesia di Kawasan Asia Tenggara. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 6(2), 141-161. <https://doi.org/10.24198/padjir.v6i2.54415>.
- Laitupa, S., & Kartika, E. D. (2020). Perspektif Hukum Lingkungan Internasional Lembaga CTI. *The Juris*, 4(2), 141-152. <https://doi.org/10.56301/juris.v4i2.117>.

- Mujiono, D. I. K., & Oktaviani, J. (2021). Segitiga Terumbu Karang Dunia (The Coral Triangle): Manfaat, Masalah dan Upaya. *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 6(01). <https://doi.org/10.36859/jdg.v6i01.405>.
- Pahlawan, H. F. (2025). Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Kerangka Kebijakan Lingkungan ASEAN. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 7(1), 134-146. <https://doi.org/10.24198/padjir.v6i2.55837>.
- Perdani, A. S., Umar, G., Dewata, I., & Amar, S. (2025). Pembangunan Berkelanjutan di Pesisir Indonesia: Tantangan dan Solusi atas Ancaman Lingkungan. *Journal of Current Research in Humanities, Social Sciences, and Business*, 2(1), 11-22. <https://doi.org/10.71383/f334qg11>.
- Polanunu, A. B. D., & Kusumaningrum, D. N. (2022). Indonesia sebagai middle power: Strategi niche diplomacy dalam manifestasi pembangunan kelautan berkelanjutan berbasis blue economy. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 4(2), 146-163. <https://doi.org/10.24198/padjir.v4i2.36645>.
- Pratiwi, H. (2025). Peran Diplomasi Halal dalam Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Biru Indonesia: Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Riset Bisnis dan Digital*, 2(2), 28-36..
- Putri, Y. N. L., & Raharyo, A. (2019). Actualizing Blue Economy: Multi-Track Diplomacy in Supporting Indonesia â€“Philippines Ocean Economy Cooperation (2014-2017). *AEGIS: Journal of International Relations*, 3(2). <http://dx.doi.org/10.33021/aegis.v3i2.710>.
- Suba, A., & Marzaman, A. P. (2024). Upaya Indonesia Sebagai Negara Di Kawasan Coral Triangle Dalam Konservasi Terumbu Karang Di Wakatobi. *Significant: Journal Of Research And Multidisciplinary*, 3(02), 74-86. <https://doi.org/10.62668/significant.v3i02.1286>.
- Trikuncoro, B., & Ridho, A. (2024). Pemanfaatan Sumber Daya Alam Di Laut Lepas Untuk Kemajuan Indonesia. *Indonesian Maritime Journal*, 12(4), 30-30.
- Wardhania, Z. D., & Burhanuddin, A. (2023). Diplomasi Budaya dan Konservasi Laut di Coral Triangle Untuk Membangun Jembatan Kerjasama Regional. *Ocean Engineering: Jurnal Ilmu Teknik dan Teknologi Maritim*, 2(4), 135-150. <https://doi.org/10.58192/ocean.v2i4.1560>.
- Wilianto, A., Mulatsih, S., & Wisudo, S. H. Indikator Komposit Potensi Wilayah Untuk Investasi Sektor Perikanan. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 15(2), 95-105. <http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v15i2.15953>.
- Wu, C. S., Pasaribu, R. G. E. J., Azzahra, J. E., Heryadi, D., & Sari, D. S. (2023). Prospek Diplomasi Ekonomi Indonesia Melalui Poros Maritim Dunia Dalam Implementasi Asean Blue Economy. *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, 5(2), 133-148. <https://doi.org/10.24843/JIWSP>.